

**EVALUASI KEBIJAKAN PANCA PROGRAM UNGGULAN
BUPATI JOKO SUTOPO DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 – 2020**

Febi Wulandari
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembakang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Tingginya angka kemiskinan serta buruknya pembangunan di Kabupaten Wonogiri menjadi latar belakang dirumuskannya kebijakan panca program unggulan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menanggapi permasalahan tersebut di bawah pemerintahan Bupati Joko Sutopo tahun 2016 – 2020 merumuskan kebijakan yang dikenal dengan panca program unggulan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan panca program unggulan di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 – 2020 dilihat dari kriteria evaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan panca program unggulan di masing – masing program sudah berjalan. Program pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi pasar tradisional, kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta pembangunan pertanian sudah terlaksana dengan capaian yang cukup bagus serta mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Wonogiri ke arah yang lebih baik, meskipun di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa program yang berjalan kurang optimal seperti program perluasan kepemilikan jaminan kesehatan dan program pembangunan pertanian.

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memperhatikan ketercapaian dari masing – masing program, melakukan validasi data masyarakat miskin secara berkala, sosialisasi secara massif kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan, serta melakukan penambahan ketersediaan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan pupuk bagi para petani.

Kata Kunci : Evaluasi, Panca Program Unggulan, Kabupaten Wonogiri

**EVALUATION OF THE POLICY OF THE FIVE FLAGSHIP PROGRAMS
OF REGENT JOKO SUTOPO IN WONOGIRI REGENCY IN 2016 – 2020**

Febi Wulandari

**Department of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro
University**Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Post
Box 1269 Phone (024) 7465407 Facsimile (024) 7465405
Page : <https://www.fisip.undip.ac.id> fisip@undip.ac.id email

Abstract

The high rate of poverty and poor development in Wonogiri Regency are the background for the formulation of the policy of the five superior programs. The Wonogiri Regency Government in responding to these problems under the administration of Regent Joko Sutopo in 2016 - 2020 formulated a policy known as the five flagship programs.

This study aims to explain and analyze the policies of the five flagship programs in Wonogiri Regency from 2016 to 2020 in terms of evaluation criteria for effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation studies.

The results showed that overall the policies of the five flagship programs in each program are already running. The road infrastructure development program, revitalization of traditional markets, free health, free education, and agricultural development have been carried out with quite good achievements and are able to bring changes to Wonogiri Regency in a better direction, even though in its implementation there are still several programs that are running less than optimally such as the health insurance ownership expansion program and agricultural development programs.

It is recommended to the Wonogiri Regency Government to pay attention to the achievement of each program, validate data on the poor periodically, socialize massively to the community about the importance of having health insurance, and increase the availability of fertilizer tailored to the needs of fertilizers for farmers

Keywords : Evaluation, Five Flagship Programs, Wonogiri Regency

A. PENDAHULUAN

Munculnya kebijakan publik di daerah merupakan wujud hadirnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan serta mengatasi berbagai permasalahan masyarakat yang ada di daerah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dibawah pemerintahan Bupati Joko Sutopo merumuskan kebijakan panca program unggulan. Kebijakan panca program unggulan merupakan terjemahan dari visi misi bupati yang terdiri dari lima skala prioritas program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan panca program unggulan juga dapat dimaknai sebagai rencana kerja bupati untuk lima tahun yang terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri. Kebijakan panca program unggulan tersebut berfokus pada lima sasaran program pembangunan daerah yang terdiri dari program pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan pasar tradisional, program pendidikan gratis, kesehatan gratis, serta pembangunan pertanian.

Tujuan utama dirumuskannya kebijakan panca program unggulan salah satunya yaitu untuk menanggulangi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri yang telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain kemiskinan, permasalahan lain yang menjadi agenda program prioritas adalah perbaikan kualitas dan pemerataan pendidikan. Di bidang pembangunan infrastruktur kebijakan panca program unggulan hadir melalui beberapa program yaitu pembangunan jalan, fasilitas kesehatan hingga pembangunan pasar tradisional. Program pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah Wonogiri yang telah lama dikenal berkondisi buruk. Pada awal tahun 2015 kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Wonogiri masih belum memenuhi unsur standar minimal. Selain itu, sarana infrastruktur kesehatan seperti puskesmas juga banyak yang berkondisi kurang layak. Permasalahan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat juga masih memberatkan. Kemudian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, kebijakan panca program unggulan memiliki program prioritas pembangunan pasar tradisional. Di bidang pertanian, program

pembangunan pertanian bertujuan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk, kurangnya benih padi serta alat – alat penunjang pertanian yang sebelum ini banyak di hadapi petani di Kabupaten Wonogiri.

Kebijakan panca program unggulan merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga perlu untuk dievaluasi agar dapat diketahui ketercapaiannya dalam menjawab persoalan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi tujuan dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir dari kebijakan publik yang penting untuk dilakukan serta berfungsi sebagai penanda bagi para stakeholder tentang apa yang telah dilakukan dengan apa yang seharusnya terjadi. Melihat hal inilah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Kebijakan Panca Program Unggulan Bupati Joko Sutopo di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2020”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

Bagaimana kebijakan panca program unggulan Bupati Joko Sutopo di Kabupaten Wonogiri tahun 2016 – 2020

dilihat dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan?.

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus permasalahan yang diuraikan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu, Menjelaskan dan menganalisa kebijakan panca program unggulan Bupati Joko Sutopo di Kabupaten Wonogiri tahun 2016 – 2020 dilihat dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk merujuk perilaku aktor atau sejumlah aktor (pejabat pemerintah, maupun suatu kelompok/ badan pemerintah) dalam melakukan suatu kegiatan atau program tertentu. Dye (2017:1) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai pilihan yang dipilih pemerintah untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Kemudian Anderson (1997:3) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang memiliki tujuan serta diikuti oleh seorang aktor atau

sekumpulan aktor dalam menangani suatu masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Kebijakan publik merujuk pada apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya. Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan kebijakan publik yaitu tindakan yang berurutan atau perilaku yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah tahap akhir dari siklus kebijakan publik. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana tujuan dari suatu kegiatan dapat terealisasi. Dunn (2003:608) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan yang berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai manfaat dari suatu program atau kebijakan. Ketika hasil pelaksanaan kebijakan mempunyai nilai maka dapat dikatakan kebijakan tersebut telah mampu menjawab permasalahan yang tengah diatasi. Lebih lanjut Wirawan (dalam Muh. Firyal Akbar dan Widya Kurniawati, 2018:16) memberikan pemahaman bahwa evaluasi merupakan

kegiatan mengkaji, menganalisa, mengumpulkan, serta menyajikan informasi yang berguna tentang objek evaluasi, menilainya dengan memberikan perbandingan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Evaluasi kebijakan dalam siklus kebijakan publik memiliki tujuan yakni untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Weiss sebagaimana yang dikutip Mulyadi (2016:113) menyatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk memberikan pengukuran terhadap dampak suatu program terhadap tujuan yang ditetapkan sebagai sarana untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan selanjutnya dan meningkatkan program di masa depan. Dalam evaluasi kebijakan membutuhkan adanya parameter yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai suatu program/kegiatan/kebijakan berhasil atau tidaknya. Indikator atau parameter dapat dipahami sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkatan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dunn (2003:610) mengembangkan kriteria untuk mengukur pencapaian kebijakan publik.

Adapun kriteria evaluasi menurut William N. Dunn adalah sebagai berikut:

Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok – kelompok tertentu?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok – kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai?

Sumber : William Dunn, 2003:610.

Penggunaan indikator dalam evaluasi kebijakan memiliki peranan yang sangat penting utamanya untuk menilai atau mengukur apakah hasil pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah

direncanakan sebelumnya atau tidak. Kemudian, evaluasi apabila dilihat dari apa yang dinilai dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi proses (formatif) dan evaluasi hasil (sumatif). Evaluasi kebijakan di dalam perkembangannya, melahirkan beberapa pendekatan yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan evaluasi formal. Bisa demikian karena penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi mengenai hasil penilaian pelaksanaan kebijakan yang didasarkan atas tujuan atau sasaran dari program yang ditetapkan pembuat kebijakan yang mana dalam hal ini adalah Bappeda. Sementara berdasarkan apa yang dinilai penelitian ini termasuk kedalam evaluasi hasil (sumatif). Hal ini dikarenakan kebijakan panca program unggulan di Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sementara penelitiannya dilakukan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara mendalam mengenai suatu fenomena sosial yang sifatnya kompleks. Creswell (2017:41)

memberikan makna penelitian kualitatif sebagai cara untuk menggali dan memahami perilaku individu atau kumpulan individu yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Panca Program Unggulan Bupati Joko Sutopo di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2020 dilihat dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan “Alus Dalane”

Program pembangunan infrastruktur jalan “Wonogiri Alus Dalane” memiliki tujuan memperbaiki kondisi jalan terutama di wilayah pedesaan, agar mempermudah akses antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Program pembangunan infrastruktur jalan ini telah diimplementasikan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri (RPJMD)

Tahun 2016 – 2021 dengan fokus pembangunan ditujukan pada jalan kabupaten. Di dalam pengimplementasiannya program pembangunan infrastruktur menjadi kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai pihak yang merencanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan jalan, dengan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu kontraktor pemenang lelang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan. Sumber daya dalam pengimplementasian program pembangunan jalan di Kabupaten Wonogiri salah satunya anggaran yang digunakan bersumber dari APBD, Bantuan Provinsi, serta Dana Alokasi Umum.

Jika dilihat dari kriteria efektivitas program ini sudah cukup efektif dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pembangunan jalan yang mampu menghadirkan jalan kabupaten yang berkondisi baik hingga capaian 87,35% dari panjang total jalan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Angka ini juga merepresentasikan program pembangunan jalan sudah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran efisiensi program pembangunan infrastruktur jalan dalam penelitian ini adalah efisiensi anggaran. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa alokasi anggaran yang digunakan dalam program pembangunan

infrastruktur jalan sudah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan data yang bersumber dari *website* pemerintah Kabupaten Wonogiri anggaran yang digunakan untuk program pembangunan infrastruktur jalan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dalam penetapan tahun 2020 adalah sebesar Rp 1,30 triliun rupiah.

Selanjutnya, kriteria kecukupan yang diukur dari seberapa jauh pencapaian hasil program pembangunan infrastruktur jalan mampu memecahkan permasalahan buruknya kondisi jalan di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa kondisi jalan di Kabupaten Wonogiri setelah adanya program pembangunan jalan menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditandai dengan semakin lancarnya akses antar wilayah serta memudahkan mobilitas masyarakat.

Kriteria perataan implementasi panca program unggulan menggambarkan pelaksanaan pembangunan jalan yang tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah saja, melainkan juga dilaksanakan pada wilayah – wilayah pinggiran yang menjadi prioritas. Ketercapaian aspek responsivitas program pembangunan infrastruktur jalan

dalam kebijakan panca program unggulan juga menunjukkan pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program pembangunan infrastruktur jalan apabila dilihat dari kriteria ketepatan merupakan program yang tepat untuk dilaksanakan. Bisa demikian karena pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan ini didasarkan pada tingkat urgensi permasalahan yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Program pembangunan infrastruktur jalan hadir untuk memperbaiki kondisi jalan di Kabupaten Wonogiri yang telah lama berkondisi buruk.

2. Revitalisasi Pasar Tradisional “Rame Pasare”

Revitalisasi pasar merupakan upaya untuk menghidupkan kembali pasar tradisional yang telah mengalami kemunduran (Nida, 2014). Keberadaan pasar tradisional dewasa ini semakin tertinggal dibandingkan dengan pasar modern. Hal ini disebabkan karena permasalahan internal dari pasar tradisional itu sendiri seperti pengelolaan manajemen pasar yang masih buruk, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, serta penataan pasar yang semrawut. Kondisi ini juga terjadi di pasar – pasar tradisional yang ada di Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri guna untuk mengatasi

permasalahan tersebut mengeluarkan program revitalisasi pasar tradisional yang menjadi satu dari lima kebijakan panca program unggulan Bupati Joko Sutopo yang mulai dilaksanakan di tahun 2017. Implementasi program revitalisasi pasar menjadi urusan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri. Dalam pengimplementasiannya program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri telah mampu membangun 9 (sembilan) pasar tradisional yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari kesembilan pasar tradisional yang berhasil direvitalisasi diantaranya adalah Pasar Wonogiri Kota, Pasar Baturetno, Pasar Wonokarto, Pasar Giritontro, Pasar Tirtomoyo, Pasar Bulukerto, Pasar Purwantoro, Pasar Eromoko dan Pasar Wuryantoro.

Evaluasi program revitalisasi pasar tradisional apabila dilihat dari kriteria evaluasi yang pertama yaitu efektivitas sudah terpenuhi. Efektivitas pencapaian program pembangunan pasar ini dapat dilihat dari aspek perbaikan fisik jumlah pasar tradisional yang berhasil direvitalisasi yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Pengukuran efektivitas program revitalisasi pasar juga dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian apabila ditinjau dari aspek

efisiensi yang diukur dari penggunaan anggaran yang digunakan, program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menghabiskan dana kurang lebih sekitar Rp120,67 milyar rupiah. Di dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran tersebut juga sudah menerapkan aspek penghematan seperti dalam revitalisasi Pasar Baturetno pada tahun 2017 yang mampu menghemat anggaran hingga kurang lebih sekitar Rp 2.000.000.000,00 miliar lebih dari total alokasi anggaran Rp 50.000.000.000,00 milyar yang disediakan APBD Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya apabila dilihat dari kriteria kecukupan, program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri telah mampu memecahkan permasalahan buruknya infrastruktur pasar yang ada selama ini. Melalui capaian pembangunan 9 pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri maka dapat dikatakan keberadaan pasar tradisional di hampir setiap kecamatan dalam kondisi yang baik daripada sebelumnya. Semakin baiknya infrastruktur pasar di Kabupaten Wonogiri juga berkontribusi pada tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020 saja, pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan pasar mencapai Rp 3.368.200.000,00 dan angka ini merupakan nilai yang cukup besar dan strategis. Aspek perataan yang diukur dari pemerataan

distribusi pelaksanaan program, program revitalisasi pasar tradisional sudah dilaksanakan secara merata. Perataan dalam evaluasi ini melihat bagaimana pelaksanaan revitalisasi yang tidak hanya berpusat pada pasar – pasar yang lokasinya dekat dengan ibukota kabupaten tetapi juga dilakukan di pasar – pasar yang berada di kecamatan pinggiran.

Responsivitas atau tanggapan dari masyarakat dengan adanya program revitalisasi pasar juga positif yang mana hal ini dibuktikan dengan meningkatnya gerak ekonomi masyarakat serta tanggapan masyarakat yang menyatakan sarana dan prasarana penunjang pasar seperti mushola, toilet, dan juga tempat parkir menjadi lebih baik dan lengkap.

Program revitalisasi pasar apabila dilihat dari kriteria ketepatan merupakan program yang sudah tepat dilaksanakan. Bisa demikian karena peran pasar tradisional yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Namun, di Kabupaten Wonogiri keberadaan pasar tradisional sebelum adanya kebijakan panca program unggulan kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan kondisinya banyak yang kumuh, bangunannya tua serta tidak tertata. Kondisi inilah yang mendasari dilaksanakannya program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri.

3. Peningkatan Kualitas Kesehatan “Sehat Rakyat”

Selanjutnya di bidang kesehatan, Kabupaten Wonogiri memiliki program “Sehat Wargane” yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan tujuan tersebut memiliki beberapa kegiatan seperti melakukan perbaikan kualitas sarana dan prasarana kesehatan mulai dari puskesmas dan rumah sakit serta memperluas akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu. Implementator program peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Wonogiri adalah Dinas Kesehatan. Hasil pelaksanaan program peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Wonogiri ditinjau dari aspek pembangunan fasilitas kesehatan hingga tahun 2020 telah di bangun diantaranya ada 9 puskesmas yakni Puskesmas Purwantoro I, Puskesmas Jatisrono I, Puskesmas Wonogiri I, Puskesmas Pracimantoro I, Puskesmas Paranggupito, Puskesmas Giriwoyo II, Puskesmas Tirtomoyo 1, Puskesmas Eromoko, dan Puskesmas Baturetno II, satu rawat inap yaitu Puskesmas Rawat Inap Wuryantoro serta 15 Puskesmas Pembantu. Selain berfokus pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, program kesehatan gratis ini juga berupaya untuk

memperluas cakupan kepemilikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Wonogiri terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan pemerintah pusat dan Jamkesda yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Evaluasi program peningkatan kualitas kesehatan dari segi efektivitas dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang berhasil dibangun serta presentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dari tahun 2016 sampai 2020. Pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sudah efektif dilaksanakan yang mana hal ini menandakan pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, akan tetapi apabila dilihat dari presentase cakupan kepemilikan jaminan kesehatan, kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Wonogiri belum memenuhi target yang telah ditentukan. Kabupaten Wonogiri menargetkan seluruh penduduknya memiliki jaminan kesehatan lebih khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Namun hingga tahun 2020, kepemilikan jaminan kesehatan di Kabupaten Wonogiri baru mencapai 54,13% dari jumlah total penduduk yang ada. Jika dilihat dari kriteria efisiensi

penggunaan anggaran dalam program peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Wonogiri sudah cukup efisien. Dana yang digunakan dalam program “Sehat Wargane” hingga tahun 2020 adalah sebesar Rp264,38 miliar dan digunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan serta memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat seperti membebaskan biaya retribusi puskesmas se – Kabupaten Wonogiri. Anggaran tersebut juga sudah diserap secara optimal untuk membangun 9 puskesmas, 15 puskesmas pembantu dan perbaikan rumah sakit daerah.

Kemudian kecukupan program peningkatan kualitas kesehatan yang dinilai dari seberapa jauh pelaksanaan program dalam memecahkan permasalahan kesehatan di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya program tersebut menjadikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Wonogiri semakin baik. Fasilitas kesehatan seperti ketersediaan puskesmas sudah merata di setiap kecamatan dengan kondisi yang lebih layak. Permasalahan tingginya biaya berobat juga mampu teratasi dengan melakukan pembebasan biaya retribusi puskesmas khususnya bagi masyarakat miskin yang belum dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional serta menggratiskan biaya rawat inap di bangsal kelas III

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Dimensi pemerataan yang diukur dari pelaksanaan program apakah sudah merata dan adil atau tidak menunjukkan jika program peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Wonogiri apabila dilihat dari pembangunan fasilitas kesehatannya sudah merata. Hal ini terbukti dari pemerataan pembangunan puskesmas yang ada di tiap – tiap kecamatan. Akan tetapi, dari aspek kepemilikan jaminan kesehatan yang dimiliki masyarakat, belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih banyak masyarakat yang belum masuk kepesertaan jaminan kesehatan. Pada tahun 2020 masih terdapat kurang lebih sekitar 478.601 penduduk yang belum tercover jaminan kesehatan pemerintah. Kemudian responsivitas masyarakat dalam menanggapi adanya program peningkatan kualitas kesehatan juga cukup positif. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program kesehatan gratis tersebut.

Ketepatan pelaksanaan program dalam evaluasi program kesehatan gratis dilihat dari ketepatan dalam pemberian program kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat sebagai penerima program. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan diperoleh temuan jika pelaksanaan program kesehatan gratis sudah tepat sasaran. Masyarakat yang

menerima program kesehatan ini diutamakan mereka dari keluarga tidak mampu.

4. Program Pendidikan Gratis “Pinter Rakyat”

Kemudian penyelenggaraan pendidikan gratis yang diwujudkan dalam program perluasan akses dan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Program pemberian seragam gratis bagi siswa SD – SMP dan program beasiswa mahasiswa berprestasi merupakan contoh dari program pendidikan gratis yang sudah terlaksana di Kabupaten Wonogiri. Program pendidikan gratis diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan dalam pengimplementasiannya pengadaan program ini juga merupakan wujud langkah Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk membangun dan mengembangkan potensi SDM yang ada di Wonogiri.

Jumlah penerima program beasiswa mapres Kabupaten Wonogiri angkanya meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada awal implementasinya program ini baru menjangkau 166 penerima. Kemudian di tahun 2020 program ini telah mampu menjangkau 600 mahasiswa. Setiap mahasiswa yang lolos program beasiswa mapres akan mendapatkan dana pendidikan sebesar Rp12.000.000,00 setiap tahunnya. Di

tingkat pendidikan dasar program pemberian seragam gratis juga telah terlaksana. Program tersebut pertama kali dilaksanakan di tahun 2020 dengan sasaran peserta didik yang baru memasuki kelas I SD/MI dan kelas VII SMP/MTS. Anggaran program seragam gratis bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri tahun 2020 dengan total alokasi Rp8.404.502.645,00. Kurang lebih sebanyak 19.607 siswa telah mendapatkan seragam gratis masing – masing tiga stel, untuk siswa SD berupa pakaian merah putih, batik, dan pramuka sementara SMP seragam putih biru, batik dan pramuka (<https://wonogirikab.go.id>).

Apabila ditinjau indikator efektivitas, program pendidikan gratis di Kabupaten Wonogiri sudah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi yang setiap tahunnya selalu meningkat serta ketercapaian pemberian seragam gratis yang mampu menjangkau siswa SD dan SMP yang ada di setiap sekolah di Kabupaten Wonogiri.

Dari dimensi efisiensi, program pendidikan gratis sudah cukup efisien pelaksanaannya. Penyerapan anggaran di masing – masing program sudah disesuaikan dengan jumlah penerima dari program tersebut. Kecukupan program pendidikan gratis juga sudah mampu

memecahkan permasalahan pendidikan seperti tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Wonogiri. Setelah adanya program bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah Sekolah di Kabupaten Wonogiri menunjukkan angka yang positif. Pelaksanaan program pendidikan gratis juga sudah dilaksanakan secara merata. Perataan disini dilihat dari realisasi program yang mampu menjangkau SD/ MI dan juga SMP/MTs se-Kabupaten Wonogiri. Program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi juga sudah memenuhi kriteria perataan yang mana hal ini dapat dilihat dari penerima program tersebut yang berasal dari 25 Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri.

Responsivitas masyarakat dengan adanya program pendidikan gratis juga positif. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Dari aspek ketepatan program pendidikan gratis sudah tepat sasaran. Pemberian program penghargaan beasiswa mahasiswa berprestasi sudah tepat. Hal ini peneliti amati melalui proses seleksi yang harus diikuti serta kriteria – kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa, sehingga melalui hal ini masyarakat yang mendapat program ini benar – benar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan program dari pemerintah.

5. Program Pembangunan Pertanian “Makmur Petanine”

Salah satu hal yang mendasari dikeluarkannya kebijakan panca program salah satunya bertujuan untuk mengatasi permasalahan dibidang pertanian. Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, urusan pertanian menjadi hal yang strategis dan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Program pembangunan pertanian ini hadir untuk mengatasi permasalahan tingginya biaya pertanian yang selama ini banyak dikeluhkan oleh petani. Selain itu program pembangunan ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat produktivitas hasil pertanian petani di Kabupaten Wonogiri. Program pembangunan pertanian di Kabupaten Wonogiri menjadi kewenangan atau urusan dari Dinas Pertanian dan Pangan. Program pembangunan pertanian di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan melalui pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan), penyediaan pupuk, pembangunan irigasi, bantuan bibit tanaman serta pendampingan petani. Hingga tahun 2020, jumlah alat mesin pertanian “Alsintan” yang terdiri dari mesin perontok padi, penanam tanaman padi, traktor, dan juga alat pemanen telah disalurkan kepada masyarakat melalui kelompok tani kurang lebih sekitar 2.341 alat (Solopos.com, 2020).

Dalam aspek efektivitas, program pembangunan pertanian sudah berjalan cukup efektif. Berbagai program yang

dicanangkan dalam bidang pertanian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Wonogiri. Melalui berbagai program tersebut pemerintah berharap dapat menurunkan beban pertanian yang selama ini belum mendapat perhatian dari kebijakan pemerintah.

Penggunaan anggaran program pertanian ini apabila dilihat dari kriteria evaluasi efisiensi sudah dilaksanakan secara efisien. Anggaran yang digunakan untuk program “Sukses Petanine” hingga tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp79,98 milyar dan digunakan untuk membangun sarana pertanian serta pemberian hibah alat mesin pertanian kepada para petani. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri yang dianggarkan setiap tahunnya.

Namun kecukupan program pembangunan pertanian terutama dalam penyediaan pupuk belum terpenuhi. Kelangkaan pupuk masih menjadi permasalahan yang banyak dihadapi oleh petani. Dalam hal perataan pelaksanaan program pembangunan pertanian juga belum merata. Hal ini demikian karena masih banyak petani di Kabupaten Wonogiri yang belum merasakan hasil pelaksanaan dari program tersebut seperti distribusi pupuk dan bantuan alat mesin pertanian yang tidak semua petani memperolehnya. Kemudian dari aspek

responsivitas, tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan pertanian belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Hal ini dapat diketahui dari sulitnya pemenuhan pupuk bagi para petani karena stoknya yang terbatas dipasaran.

Apabila dilihat dari ketepatannya, program pembangunan pertanian tepat untuk dilaksanakan meskipun didalam pelaksanaannya masih belum optimal. Kompleksnya permasalahan pertanian di Kabupaten Wonogiri menjadi dasar dicetuskannya program tersebut. Sebagai kabupaten dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, permasalahan di bidang pertanian menjadi hal krusial yang perlu untuk segera ditangani. Mengingat sektor ini menjadi tumpuan dan sumber pendapatan utama bagi masyarakat.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara umum masing – masing program dalam kebijakan panca program unggulan sudah terlaksana di Kabupaten Wonogiri. Hasil implementasi dari masing – masing program terdapat beberapa program yang telah mampu mencapai keenam kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan yaitu

program pembangunan infrastruktur jalan, program revitalisasi pasar tradisional, pembangunan fasilitas kesehatan, dan program pendidikan gratis. Sementara, untuk program perluasan kepemilikan jaminan kesehatan dan pembangunan pertanian belum dilaksanakan dengan baik. Program perluasan kepemilikan jaminan kesehatan belum mampu memenuhi keenam kriteria evaluasi yang ada, sedangkan untuk program pembangunan pertanian sudah mampu memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan juga ketepatan, namun program tersebut belum mampu memenuhi kriteria kecukupan, responsivitas, dan juga pemerataan.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu untuk memperhatikan ketercapaian dari masing – masing program yang menjadi prioritas karena masih ditemukan beberapa program yang belum memenuhi target yang telah ditentukan.
2. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Sosial perlu melakukan validasi data masyarakat miskin secara berkala, untuk memudahkan dalam pendataan masyarakat kurang mampu yang belum masuk kekepesertaan jaminan kesehatan nasional.
3. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Kesehatan perlu melakukan sosialisasi secara massif

kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS maupun Jamkesda.

4. Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri perlu melakukan penambahan ketersediaan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan pupuk bagi para petani di setiap kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. In *Understanding Public Policy*.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta:UGM Press
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya.
- Santosa, Purwo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- William Dunn, N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik by William N. Dunn (z-lib.org).pdf* (p. 710).

Skripsi dan Jurnal

- Amanda, P. I. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan*

Internet

- Dishub.wonogirikab.go. (17 Februari 2019). *Capaian 3 Tahun Panca Program Bupati Wonogiri*. Diakses pada 16 Maret 2022, dari <https://dishub.wonogirikab.go.id/berita/detail/capaian-3-tahun->

Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social andGovernment*, 1, 34–38.

<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>.

- Gunawan S. (1999). *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*. *Jurnal Perencanaan Wilayah Kota*.

- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). *Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur*. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*,4(2), 1086–1095.

<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2>

- Muadi, Sholih, dkk. (2016). *Perumusan dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. *JRP (JurnalReview Politik)*, 6(2), 195–224.

<http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078>

- Nida, M. M. (2014). *Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta*. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(2), 166. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7647>

- Nurani, A. S., Zauhar, S., & Saleh, C. (2015). *Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif New Public Service*. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(04), 213–220. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.04.1>

- panca-program-bupati-wonogiri.jateng.bpk.go. (11 Januari 2018). *Pemkab Wonogiri Alokasikan Rp 25 Miliar untuk Pendidikan Gratis*. Diakses pada 8 Januari 2022, dari <https://jatengprov.go.id>

Solopos.com. (17 Februari 2020). 4
Tahun Joko Sutopo – Edy Santosa
: Sinergi Entaskan Kemiskinan
Wonogiri. Diakses pada 8
Februari 2022, dari
[https://www.solopos.com/4-
tahun-joko-sutopo-edy-santosa-
sinergi-entaskan-kemiskinan-
wonogiri-1047422](https://www.solopos.com/4-tahun-joko-sutopo-edy-santosa-sinergi-entaskan-kemiskinan-wonogiri-1047422)

Wonogirikab.go. (18 September 2020).
Siswa SD dan SMP se-Wonogiri
Terima Seragam Gratis dari
Pemkab. Diakses pada 10
Februari 2022, dari
[https://wonogirikab.go.id/siswa-
sd-dan-smp-se-wonogiri-terima-
seragam-gratis-dari-pemkab/](https://wonogirikab.go.id/siswa-sd-dan-smp-se-wonogiri-terima-seragam-gratis-dari-pemkab/)